

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alan Ehrenhalt, 2006, *Demokrasi dalam Cermin: Politik Akar Rumput dan Reformasi di Amerika Serikat*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Aos Kuswandi, 2004, *Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD*. Bekasi: Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam'45,'.
- Asshiddiqie, J. 2022. *Hukum Tata Negara dan Dinamika Legislasi di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, W. 2019. *Legislasi dan Implementasi Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2022, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Setiyono, 2023, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019, *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Estiawan Adi Luhung, 2024, *Peran Sekretariat DPRD dalam Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Freddy Poernomo, 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jimly Ashiddqie, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif, DPR, DPRD & DPD*, Jakarta: Visimedia.
- Mohamad Khamim, 2021, *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*, Pekalongan: Penerbit Nem.

- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, B. 2021. *Politik Legislasi di Indonesia: Antara Konstitusi dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin Haris, 2005, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi Dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Titik Triwulan Tutik, 2016, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media.
- Wahyudin Darmalaksana, 2020, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: Buku Mojok.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S., & Nurbani, Erlies Septiana. 2011. *Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *Proses Legislasi di Indonesia: Sebuah Panduan Praktis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Tim Penyusun Kamus Hukum. 2012. *Kamus Hukum: Pengertian dan Istilah-Istilah dalam Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Ahmad, A. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bagir Manan, B. 2009. *Hukum Konstitusi dan Kewenangan Lembaga Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, M. 2017. *Perubahan Konstitusi dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, A. 2015. *Masa Transisi Politik dan Keseimbangan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mulia, S. 2019. *Fungsi Legislatif dan Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Nugroho, R. 2014. Politik Hukum dan Proses Legislasi di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Subekti, B. 2016. Filosofi Perubahan Konstitusi dan Masa Transisi Politik. Jakarta: Erlangga.
- Wiryo, W. 2018. Ketatanegaraan dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Yunus, M. 2020. Sistem Politik Indonesia dan Implikasinya terhadap Demokrasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Alfitri, D. 2020. Revisi UU KPK: Antara Kepentingan Politik dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Kencana.
- Dedi Sahputra Napitupulu & Rahmat Asri Sufa. 2019. Politik Islam di Persimpangan Jalan. Malang : Azizah Publishing.
- Dedi Sahputra Napitupulu & Rahmat Asri Sufa. 2017. Refleksi Kehidupan. Medan : Yayasan Al-Hayat.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2020). Pergeseran Legitimasi Hukum: Dampak UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK. Jakarta: PSHK.

B. Jurnal dan Skripsi

- Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, 2019, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2.
- Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, dan Ni Luh Gede Astariyani, 2020, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3.
- Zein, F. (2021). Keputusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja: Implikasi terhadap Legitimasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 45-56.
- Budiman, A. (2020). Kritik dan Protes terhadap UU Cipta Kerja: Perspektif Masyarakat Sipil. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(4), 310-325.
- Emha Ainuddin dan Djoko Purwanto, 2023, "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before The Law," *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Fitra Arisl, Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti, 2023, "Law Making Activities During Masa transisi Sessions in Indonesia (1997–2020)," *Parliamentary Affairs*, Vol. 76, No. 2.
- Hamrin, H., & Endratno, C. Masa jabatan lembaga legislatif di Indonesia guna menegakkan prinsip konstitusionalisme. *Jurnal Lex Publica*, 8(2), 2023.

91–106. Universitas Nasional Jakarta.
<https://journal.unas.ac.id/law/article/view/1677>

Husnul Khatimah Djafar, and Andi Risma, 2024, "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2.

Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, dan Heillen Martha Yosephine Tita, 2021, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6.

Kusuma, D. P. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 3(1), 2021. 55–68. Institut Ilmu Manajemen Jambi.
<https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Al-Ashlah/article/view/4>

Mahrizar Hasibuan dan Irwansyah, 2023, "Evaluasi Implementasi Periode 'Masa transisi' Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2.

Nandang Alamsah Deliarnoor, 2015, "Problematisasi Pelaksana Tugas (Plt) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2.

Nur Lian, 2024, "Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat," *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Nurradian, 2024, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Masa transisi Masa transisi Perspektif Masalah Mursalah," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Oksalin Girysvia Ulaan, Dani Robert Pinasang, dan Josepus J. Pinori, 2024, "Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4.

Risalatul Firdaus, 2024, "Dinamika Pembentukan Hukum Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia," *Humani*, Vol. 1, No. 3.

Riswanto, A. Strategi politik hukum dalam meningkatkan kualitas kinerja DPR RI terhadap produktivitas legislasi nasional. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 2022. 23–41. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/4140>

Ruusen, G. M. Analisis yuridis fungsi legislasi DPR bersama Presiden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Administratum*, 9(2), 2020. 112–124. Universitas Sam Ratulangi.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/21484>

Sulistriani, 2024, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa Masa transisi pada Pemilihan Umum Tahun 2024," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Zulfan, 2018, "Pemisahan Kekuasaan Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Fungsi Legislasi," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 2.

Suryono, Budi & Anggoro, Iwan, "Peran DPR RI dalam Pembentukan Undang-Undang pada Masa Transisi Politik di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 85-102.

Ahmad, Syafrudin, "Penerapan Fungsi Legislasi DPR dalam Masa Transisi," *Jurnal Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 23-41.

Wibowo, Sutrisno, "Dinamika Pembentukan Undang-Undang dalam Periode Transisi Politik di Indonesia," *Skripsi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2018, hlm. 32-50.

T. H. Marbun, J. "Kewenangan Legislatif pada Masa Transisi dan Implikasinya terhadap Demokrasi," *Jurnal Politik dan Hukum*, Vol. 9, No. 1. 2018. Halaman: 40-59.

C. UUD dan Norma-Norma Hukum

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Keputusan MK tentang Cipta Kerja yang Inkonsistensial Bersyarat", dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Undang-Undang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penataan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. Internet

Fahmi Ramadhan Firdaus, 2024, "Apakah Praktik Masa transisi Dikenal di Parlemen Indonesia?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-praktik-ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-lt612de402e8191/>.

By Redaksi, 2024, "Tolak Keras Revisi UU MK, Surat Terbuka Untuk Jokowi dan Puan Dari 26 Akademisi," <https://arusbawah.co/tolak-keras-revisi-uu-mk-surat-terbuka-untuk-jokowi-dan-puan-dari-26-akademisi/>.

Tim Hukum Online, 2024, "Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR," <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/>.

Tirto, I. (2020). Dinamika Legislatif dan Kepercayaan Publik: Studi Kasus UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK. *Tirto.id*. <https://tirto.id>